



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
POLRES METRO JAKARTA SELATAN TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak manusia.

Polres Metro Jakarta Selatan selaku bagian dari institusi Polri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi Kamtibmas dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang meliputi 10 kecamatan yang berada dibawah kota administrasi Jakarta Selatan, demi terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2017 walaupun secara umum relatif aman dan kondusif, namun demikian masih terjadi gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat seperti : premanisme baik yang berada di jalanan (street crime) maupun premanisme yang terorganisir, segala macam bentuk perjudian, kejahatan narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan serta terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

bahwa sebagai pertanggungjawaban Polres Metro Jakarta Selatan dalam penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam rangka pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2017 juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta upaya tindak lanjut perbaikannya, sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polres Metro Jakarta Selatan

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres Metro Jakarta Selatan.

a. Kedudukan

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Madya yang berada dibawah Polda Metro Jaya.

b. Tugas

Polres Metro Jakarta Selatan bertugas:

- 1) melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- 2) melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

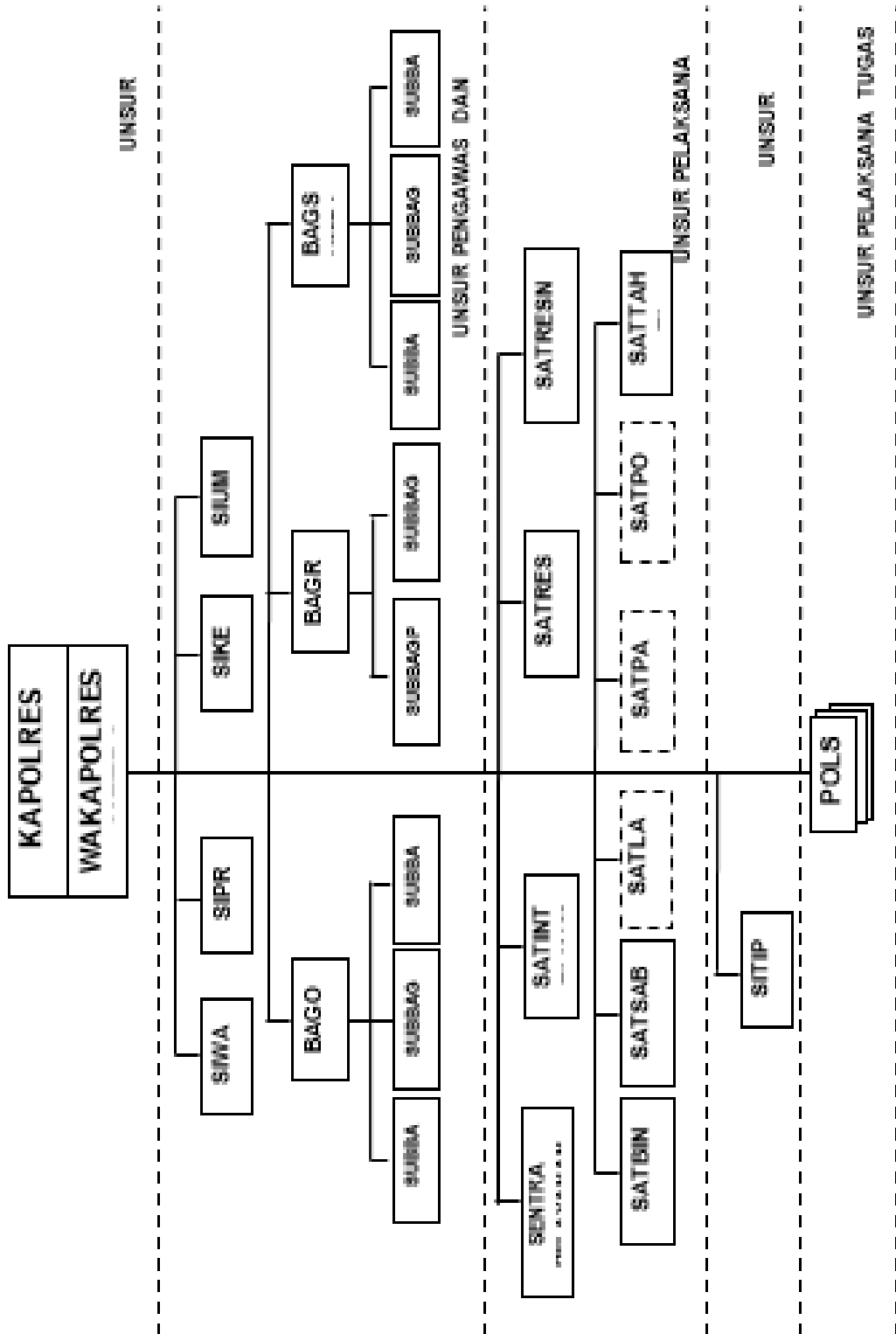
Dalam melaksanakan tugas Polres Metro Jakarta Selatan Jaya sebagaimana dimaksud di atas, Polres Metro Jakarta Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin atau keterangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Metro Jakarta Selatan

Selatan dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- 3) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
- 4) pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
- 5) pelaksanaan lalu lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- 6) pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Struktur Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan



D. Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2015-2019

1. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polres Metro Jakarta Selatan, maka visi yang dirumuskan Polres Metro Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Polres Metro Jakarta Selatan yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna memantapkan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian “.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Polres Metro Jakarta Selatan memiliki misi yaitu :

- a. mewujudkan kecintaan dan kepercayaan publik (*trust building*) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep “Polres Besar-Polsek Kuat.”;
- b. mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan unggul, yang menjunjung etika dan sendi-sendi HAM;
- c. meningkatkan kesejahteraan personel Polri (*well motivated and welfare*);
- d. mewujudkan intelijen Polri yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, melalui kegiatan deteksi aksi, deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif guna pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan;
- e. mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan instansi terkait;
- f. mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g. mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- h. mewujudkan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi guna mengoptimalkan kinerja Polri; dan
- i. mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan profesi.

3. Tujuan.....

3. Tujuan

- a. terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan Clean Government;
- b. terwujudnya revolusi mental personel Polri berupa perubahan mind set dan culture set sejalan reformasi birokrasi Polri;
- c. terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari;
- d. terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat; dan
- e. terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

4. Sasaran Strategis

- a. terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepolisian;
- b. terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas;
- c. terwujudnya aparatur Polres Metro Jakarta Selatan yang bersdih dan bebas dari KKN.

5. Pentahapan Kebijakan

a. Pada Tahun 2015

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebutuhan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almtsus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

b. Pada Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM berkualitas guna menghadapi ancaman gangguan kamtibmas.

c. Pada Tahun 2017

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung SDM berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi ancaman gangguan kamtibmas.

d. Pada Tahun 2018

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

e. Pada

e. Pada Tahun 2019

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terdepan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, SDM berkualitas dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas.

E. Permasalahan

1. rasio personel Polres Metro Jakarta Selatan dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan belum pada kondisi ideal (1:300), kondisi pada akhir tahun 2017 jumlah penduduk di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan 2.071.818 jiwa berbanding dengan personel Polri Polres Metro Jakarta Selatan 1.663 personel, dengan demikian 1 personel Polres Metro Jakarta Selatan melayani 1.246 orang (1:1.246);
2. penempatan personel belum berdasarkan kompetensi sehingga hasil kinerja kurang maksimal;
3. belum optimalnya pengelolaan keamanan dan penciptaan rasa aman masyarakat, baik melalui dukungan maupun penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;
4. pelayanan Kamtibmas Prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif; dan
5. kerjasama antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan instansi terkait dalam bentuk Sinergi Polisional masih belum optimal.